

ABSTRAK

Keberadaan pengemis anak di bawah umur di Kota Lhokseumawe masih menjadi permasalahan sosial yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Fenomena ini diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta masih adanya praktik eksploitasi anak yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas mengemis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 dalam upaya perlindungan dan penanganan pengemis anak di bawah umur di Kota Lhokseumawe serta mengidentifikasi kendala yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Dinas Sosial, Satpol PP dan WH, yayasan sosial, masyarakat, serta pengemis anak. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi, penertiban, dan upaya pembinaan terhadap pengemis anak. pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum tersedianya rumah singgah dan program rehabilitasi yang memadai. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya efek jera bagi pengemis anak turut menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya, peningkatan sosialisasi, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar perlindungan dan penanganan pengemis anak di Kota Lhokseumawe dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci; *Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Anak, Pengemis Anak, Kota Lhokseumawe*

ABSTRACT

The existence of underage child beggars in Lhokseumawe City remains a social problem, indicating that the implementation of child protection as mandated by Aceh Qanun Number 11 of 2013 concerning Social Welfare has not been fully optimized. This phenomenon is influenced by economic factors, low levels of education, and the persistence of child exploitation practices that lead children to engage in begging activities. This study aims to analyze the implementation of Aceh Qanun Number 11 of 2013 in efforts to protect and address underage child beggars in Lhokseumawe City and to identify the obstacles that hinder its implementation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the Social Affairs Office, the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah (Satpol PP and WH), social foundations, community members, and child beggars. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the policy has been implemented through inter-agency coordination, law enforcement measures, and guidance programs for child beggars. However, its implementation has not been optimal due to limited budgets, inadequate supporting facilities and infrastructure, and the absence of proper shelters and rehabilitation programs. In addition, low public awareness and the lack of deterrent effects for child beggars have also become obstacles to policy implementation. Therefore, strengthening resources, increasing public awareness through socialization programs, and enhancing synergy between the government and the community are necessary to ensure that the protection and handling of child beggars in Lhokseumawe City can be implemented effectively and sustainably.

Keywords: Policy Implementation, Social Welfare, Child Protection, Child Beggars, Lhokseumawe City.